

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1 Tinjauan Pustaka

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah hubungan antara pemilik (principal) dan agen sebagai pelaku utama yang berdasarkan kontrak pada suatu perusahaan (Meckling, 1976) dalam (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Teori agensi ini dapat digunakan untuk memahami isu pengaruh good corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingan sendiri sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara principal dengan agent. Namun, dengan adanya konflik kepentingan dan kondisi tidak seimbang, maka informasi yang terjadi antara principal dengan agent akan menyebabkan biaya keagenan yang ditanggung oleh perusahaan.

Teori keagenan juga dapat diaplikasikan dalam organisasi publik. Dalam teori ini memposisikan pemerintah daerah sebagai agent yang manamempunyai akses langsung terhadap informasi dan masyarakatnya sebagai principal yang hanya dapat menerima informasi. Hal tersebut akan dapat menyebabkan information asymmetry, keadaan ini merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain. Adanya situasi seperti itu dapat membuka peluang bagi pihak agent untuk melakukan penyelewengan. Dalam penelitian ini pihak agent merupakan pemerintah daerah

yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana daerah, sedangkan pihak prinsipal diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

Menurut (Eisenhardt) dalam (Damayanti & Primastiwi, 2021) teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat manusia yaitu: manusia lebih mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality) dan manusia menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan beberapa asumsi tersebut manajer akan bertindak opportunistic yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Permasalahan keagenan yang terjadi di suatu perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya Good Corporate Governance (GCG). Good corporate governance dalam hal ini berperan penting pada pengelolaan perusahaan yang harus diawasi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi berbagai peraturan yang telah berlaku.

1.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) dalam (Biduri, 2018) adalah sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) dalam (Biduri, 2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah

sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.

Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

a. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia). Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.

b. Jenis – Jenis Organisasi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sector publik sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berurusan dengan instansi pemerintah, seperti Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, Kantor pencatatan sipil, atau Kepolisian. Kita juga berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kita mendapati beragam organisasi sektor publik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan. Yang juga termasuk organisasi sector publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang.

Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sector publik diatas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Biduri, 2018):

- a. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.
 1. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya:
 - i. Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain.
 - ii. Lembaga dan badan Negara sepeti KPU, KPK, dan lain-lain.
 2. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya:
 - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

- b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sector publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah.

Contohnya:

- a. Perguruan tinggi BHMN
- b. Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah.
- c. Yayasan-yayasan milik pemerintah.

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Contohnya:

- a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain.
- b. Sekolah dan universitas swasta.
- c. Rumah sakit milik swasta.

2.1.3 Pengendalian Internal

Pengendalian suatu organisasi dari suatu satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan dapat dicapai. Kebijakan adalah pedoman yang dibuat oleh manajemen

untuk mencapai tujuan. Suatu kebijakan adalah pedoman umum pengambilan keputusan sedangkan prosedur adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan diamati dalam pelaksanaan suatu kebijakan (Adiko et al., 2019). Menurut Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun (2008) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Paradiredja (2002:171) dalam (Saputra, 2017) Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini : 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Sementara Arens et al. (2004) dalam (Mulia et al., 2017) mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk

memberikan jaminan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa Pengendalian Internal sangat berpengaruh dalam upaya mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian Internal dijalankan dengan tujuan untuk mencapai keandalan laporan keuangan, mencapai efektifitas dan efisiensi operasi, dan memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian Internal dapat dijalankan dengan organisasi baik publik maupun swasta. Dalam sektor pemerintahan Pengendalian Internal dikenal dengan istilah SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPIP memiliki tujuan tersendiri diantaranya yaitu untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai tujuan penyelenggaraannya secara efektif dan efisien, untuk meyakinkan bahwa aset negara bersifat aman, untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah taat terhadap peraturan perundang-undangan, untuk meyakinkan bahwa keandalan pelaporan keuangan dapat dipercaya.

2.1.3.1 Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008

- a. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

- b. sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. pengawasan internal adalah seluruh kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah UU No 60 tahun 2008 Umum SPIP terdiri atas unsur:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Resiko;
- c. Kegiatan Pengendalian; dan
- d. Pemantauan Pengendalian Internal

2.1.3.2 Pengendalian Internal Menurut COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan Internal Control – Integrated Framework tahun 1994 yang mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment).

Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan:

- a) Integritas dan nilai etika,
- b) Komitmen terhadap kompetensi,
- c) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia,
- d) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab,
- e) Filosofi manajemen dan gaya operasi,
- f) Dewan direksi dan partisipasi komite audit,
- g) Struktur organisasi.

Contoh: code of conduct, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawab, job description, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi.

2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment)

Perusahaan harus mewaspadaikan dan mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas- aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan

mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. Contoh: penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survey kepuasan customer, dan Balance Score Card (BSC).

3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (Accounting Information and Communication System)

Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan sistem informasi dan komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Contoh: staff meeting bulanan, news letter dari perusahaan, dan process for escalation of issues.

4. Aktivitas Pengendalian (Controll Activities)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-risiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas). Contoh: rekonsiliasi, protek user-ID dan password dan verifikasi tandatangan atas penarikan cek.

5. Pemantauan (Monitoring)

Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah

seiring dengan perubahan kondisi. Contoh: ongoing review of operations, penilaian kinerja karyawan dan exception reporting.

2.1.3.3 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Suwanda & Dailibas (2013) Pengendalian Internal terdiri dari lima komponen sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen Pengendalian Internal, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

d. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja Pengendalian Internal sepanjang waktu.

2.1.4 Tata Pemerintahan Yang Baik

Teori keagenan menyatakan bahwa Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Corporate Governance) memiliki peran yang penting dalam pengelolaan suatu organisasi (Priswita & Taqwa, 2019). Hal tersebut dilakukan karena pengelolaan suatu organisasi wajib terkontrol dan terkendali supaya dapat menjamin bahwa pengelolaan suatu organisasi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.

Menurut Syakhroza (2014:58) Tata Pemerintahan Yang Baik adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis maupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Armereo, 2021). Yang menerapkan sistem *Good Corporate Governance* bukan hanya perusahaan namun lingkup pemerintah juga menerapkannya. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil suatu putusan, yang mana hal tersebut akan dapat memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan (Raheni & Asri Dwija Putri, 2019).

2.1.4.1 Prinsip Dalam Tata Pemerintahan Yang Baik

Menurut (Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tahun 2002) mengenai Tata Pemerintahan Yang Baik, terdapat lima prinsip dalam Tata Pemerintahan Yang Baik yang diterapkan dalam pemerintahan :

a. **Transparansi**

Suatu organisasi diwajibkan untuk menyajikan informasi yang mudah diakses serta dipahami yang tujuannya untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan.

b. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah salah satu syarat agar dapat mewujudkan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu suatu organisasi wajib melakukan pertanggungjawaban atas kinerjanya secara transparent dan wajar.

c. **Responsibility**

Suatu organisasi dapat di akui sebagai good corporate citizen jika organisasi tersebut patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

d. **Independensi**

Dalam pemerintah desa harus dikelola dengan cara independent yang bertujuan untuk tidak ada sikap yang saling menguasai dan tidak terpengaruh oleh pihak lainnya.

e. **Fairness**

Dalam pemerintah desa kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara, serta pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama

dalam penerimaan pegawai desa dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan.

2.1.4.2 Indikator Tata Pemerintahan Yang Baik

Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance) KNKG dalam (Faiqoh, 2019) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Informasi Kebijakan
- b. Berbasis Kerja Audit
- c. Tanggungjawab
- d. Pengaruh Internal dan Eksternal
- e. Stakeholder dan Shareholder

2.1.5 Pencegahan Kecurangan

Istilah kecurangan pada umumnya dipakai untuk menjelaskan tindakan-tindakan seperti penipuan, suap, pemalsuan, pemaksaan, korupsi, pencurian, persekongkolan, penggelapan, penyalahgunaan, menyembunyian fakta, dan kolusi. Kecurangan dapat didefinisikan sebagai penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, menghindarkan diri dari kewajiban, atau merugikan pihak lain. Menurut (Dewi YR, 2017) Kecurangan adalah perbuatan yang disengaja, yang didesain, yang direncanakan terjadinya, dan didasari oleh *greedy* atau keserakahan dorongan untuk ingin mendapatkan lebih dari apa yang menjadi haknya dengan cara yang tidak patut, dan merugikan pihak lain.

Menurut (Soleman, 2013) Kecurangan merupakan penipuan yang disengaja, yang biasanya dilakukan secara terang-terangan melalui berbagai kebohongan, penjiplakan, ataupun pencurian dan kecurangan ini dapat dilakukan oleh pelanggan, kreditor, *investor*, pemasok, *banker*, penjamin asuransi atau pihak pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa kecurangan tidak hanya dilakukan oleh orang didalam organisasi tetapi juga oleh pihak luar (*eksternal*) yang memiliki peluang yang sama untuk melakukan kecurangan pada organisasi atau instansi terkait. Sejalan dengan itu, menurut Arens, dkk. (2008) kecurangan yang terjadi dalam organisasi biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen, serta adanya indikasi dari ketiga komponen yang biasanya disebut dengan *fraud triangle* yaitu: tekanan, kesempatan dan sikap.

Terlepas dari pengertian yang dipakai, karakteristik berikut umumnya ada pada setiap kecurangan (Dewi YR, 2017):

- 2.1.5.1 Pemalsuan fakta.
- 2.1.5.2 Dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk melakukan penipuan.
- 2.1.5.3 Fakta yang dipalsukan dipercayai oleh korban.
- 2.1.5.4 Berakibat kerugian karena mempercayainya.

Banyak Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Berikut merupakan factor-faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan :

1. Lingkungan Kerja
2. Tekanan dan Stres

3. Pengaruh Perilaku
4. Kebijakan Organisasi
5. Pertimbangan Geografis

2.1.5.1 Jenis Kecurangan dan Pendeteksinya

Menurut (Dewi YR, 2017) terdapat 3 jenis kecurangan dan pendeteksinya, yaitu:

- 1) Kecurangan atas Laporan Keuangan

Kecurangan atas laporan sering dilakukan dengan menggunakan cara mencatat lebih tinggi atas akun harta dan pendapatan. Kecurangan atas laporan ini dilakukan karena terdapat tekanan yang kuat dari atasan. Hal ini dilakukan supaya perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus dan mencapai target. Oleh karena itu dibutuhkan proses pelaporan yang jelas dan terarah. Proses pelaporan dapat didasari oleh suatu konsep yang di tuangkan ke dalam dokumen resmi. Dengan adanya laporan setiap periode dapat dijadikan acuan dalam evaluasi di akhir periode.

Kecurangan atas penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Analisis vertical, merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarannya dalam persentase. Analisis horizontal, merupakan teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Analisis rasio,

merupakan alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item laporan keuangan.

2) Penyalahgunaan Aset

Asset merupakan suatu kemampuan secara ekonomi dimasa depan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Penyalahgunaan asset biasanya dikelompokkan dalam 2 macam kecurangan, yaitu: (a) *cash* kecurangan yang dimaksud ialah mencuri kas atau kas keluar dengan cara curang sebagai contoh memalsukan cek. (b) kecurangan atas persediaan dan aset lain, yang dimaksud adalah kecurangan berupa pemakaian dan pencurian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

Untuk mendeteksi kecurangan yang masuk kategori ini banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas Pengendalian Internal yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan yaitu *analytical review*, *statistical sampling*, *vendor or outsider complaints*, *site visit-observastion*. Metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan *anomalies*/ gejala penyimpangan yang apat di investigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode tersebut juga menunjukkan kelemahan dalam Pengendalian Internal dan mengingat/ memberi

peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya penyimpangan dimasa mendatang.

3) Korupsi

Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang dilakukan diluar pembukuan. Korupsi biasanya dilakukan dengan cara pemberian hadiah, penambahan komisi dan sebagainya. Korupsi terbagi menjadi tiga, yaitu (a) pertentangan kepentingan yang merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika pekerja mempunyai kepentingan pribadi terhadap suatu transaksi yang nantinya akan berdampak negatif bagi perusahaan. (b) Suap yang merupakan pemberian, penawaran permohonan ataupun penerimaan sesuatu yang memiliki tujuan guna memengaruhi pembentukan keputusan. (c) pemberian ilegal yang merupakan pemberian yang menyerupai suap tetapi tidak memiliki maksud untuk mempengaruhi pembentukan keputusan karena pelaku hanya memperlakukannya saja. (d) pemerasan secara ekonomi yang dimaksud adalah penjual menawarkan untuk memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaannya.

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan keluhan ke perusahaan. Atas dugaan penyimpangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas penyimpangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*red flag*) si penerima ataupun si pemberi.

Karena tindakan kecurangan dapat menyebabkan kerugian bagi suatu organisasi maka perlu dilakukan tindakan pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019). Ada beberapa faktor dalam mencegah terjadinya kecurangan yaitu memperkuat Pengendalian Internal, membentuk suasana kerja yang terbuka, menerapkan kejujuran dalam berbagai hal, saling memberi dukungan antar pekerja, dan melenyapkan peluang terjadinya kecurangan.

Menurut Tuanakotta (2013) dalam (Soleman, 2013) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mengaktifkan Pengendalian Internal. Ini berarti, Pengendalian Internal dapat menjadi penghalang atau mengurangi orang-orang dalam melakukan kecurangan yang dapat merugikan banyak orang termasuk organisasi.

2.1.5.2 Indikator Pencegahan Kecurangan

Menurut (Laksmi & Sujana, 2019) terdapat 4 indikator untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan anti-fraud,
2. Prosedur,
3. Teknik pengendalian,
4. Kepekaan terhadap fraud.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putu Santi Putri Laksmi & I Ketut Sujana	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.26.3.Maret (2019): 2155 -2182 ISSN: 2302-8556	Variabel : Kompetensi SDM, Moralitas dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. Alat analisis: Analisis Regresi linier berganda. Hasil Penelitian: Kompetensi sumber daya manusia, Moralitas dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisi : Analisis Regresi Linier Berganda. • Variabel: Variabel pada penelitian ini sama sama menggunakan Pengendalian Internal sebagai variabel independent dan Pencegahan Kecurangan sebagai variabel dependent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek dan lokasi penelitian. • Pada penelitian terdahulu dalam menganalisis pencegahan kecurangan tidak menggunakan variabel Tata Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan pada penelitian saat ini peneliti menambahkan variabel Tata Pemerintahan Yang Baik sebagai variabel

					independent.
2	Agus Budi Hartono & Arief Himmawan Dwi Nugroho	<p>Pengaruh Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan dengan intervening Tata Pemerintahan Yang Baik</p> <p>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.</p> <p>Volume 4, Special Issue 4, 2022</p> <p>P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205</p>	<p>Variabel: Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik terhadap pencegahan kecurangan.</p> <p>Alat analisis: Analisis Regresi Linier Berganda.</p> <p>Hasil Penelitian: Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik memiliki pengaruh signifikansi terhadap pencegahan kecurangan, dan Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikansi terhadap Tata Pemerintahan Yang Baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda. • Variabel: Variabel pada penelitian ini sama sama menggunakan variabel Pengendalian Internal (X1) dan Tata Pemerintahan Yang Baik (X2) serta Variabel Pencegahan Kecurangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek dan lokasi penelitian
3	Ridho Gilang Adiko, Widia Astuty dan Hafsah	<p>Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Tata Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pencegahan Kecurangan PT. Inalum</p> <p>Jurnal Akuntansi Dan</p>	<p>Variabel: Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Tata Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pencegahan Kecurangan</p> <p>Alat Analisis: Teknik analisis statistik dan analisis regresi linier berganda</p> <p>Hasil penelitian:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda • Variabel: Variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakan Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek dan Lokasi penelitian • Alat Analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis statistic dan analisis

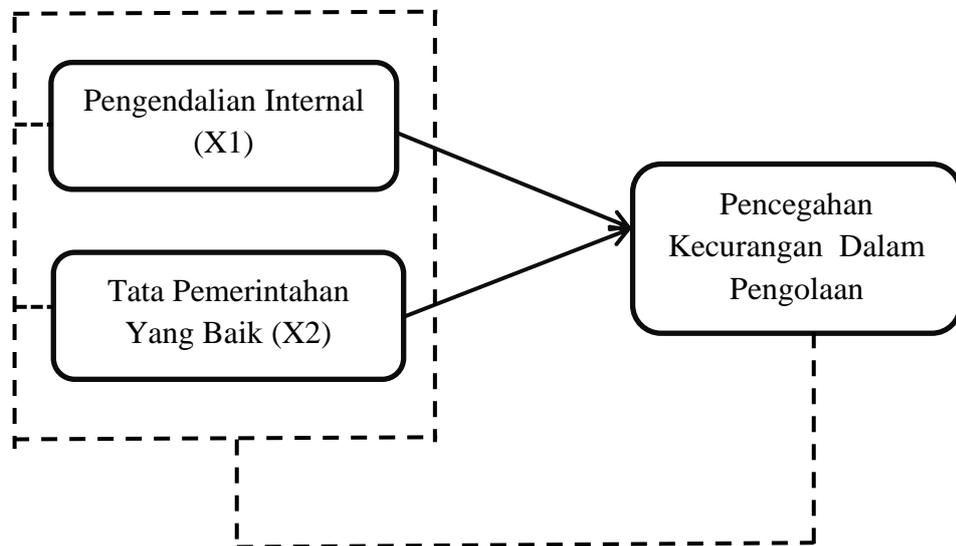
		<p>Keuangan Kontemporer.</p> <p>Volume 2 no. 1/ Mei Tahun 2019,</p> <p>e- ISSN: 2623-2596</p>	<p>Diketahui bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, etika auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan Tata Pemerintahan Yang Baik tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun secara simultan pengendalian intern, etika auditor, dan Tata Pemerintahan Yang Baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT. Inalum.</p>	<p>Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik sebagai variabel independent. Serta Pencegahan Kecurangan sebagai variabel dependent.</p>	<p>regresi linier berganda. Sedangkan pada penelitian saat ini hanya menggunakan analisis regresi linier berganda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu dalam mencegah terjadinya kecurangan menggunakan variabel Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Tata Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel Etika Auditor.
--	--	---	--	---	---

4	Abdi Saputra	<p>Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik Terhadap Kecurangan (KECURANGAN) perbangan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)</p> <p>Jurnal Akuntansi</p> <p>Volume 1 Nomor 1, Februari 2017</p> <p>e – ISSN : 2548 – 9224</p> <p>p – ISSN : 2548 – 7507</p>	<p>Variabel: Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik Terhadap Kecurangan (KECURANGAN)</p> <p>Alat Analisis: analisis Regresi linier berganda</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial sistem internal kontrol berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (kecurangan) yang berarti bahwa semakin baik sistem internal kontrol maka tingkat kecurangan akan menurun. Kedua secara parsial audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (kecurangan) berarti semakin baik audit internal dalam sebuah perusahaan maka tingkat kecurangan (Kecurangan) akan menurun. Selanjutnya adalah secara parsial penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (kecurangan) yang juga berarti semakin baik penerapan GCG maka tingkat kecurangan akan menurun. Hasil uji F juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda. • Variabel: Variabel pada penelitian ini sama sama menggunakan variabel Pengendalian Internal (X1) dan Tata Pemerintahan Yang Baik (X2) serta Variabel Pencegahan Kecurangan (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek dan lokasi Penelitian • Pada penelitian terdahulu dalam mencegah terjadinya kecurangan menggunakan variabel Pengendalian Intern, Kontrol, Dan Tata Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel control dan audit internal.
---	--------------	--	---	--	--

5	Ni Putu Yulia Paramitha & I Made Pradana Adiputra : 2020	<p>Pengaruh Whistleblowing System, Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.</p> <p>Vol : 11 No : 2 Tahun 2020</p> <p>e- ISSN: 2614 – 1930.</p>	<p>Variabel: Whistleblowing System, Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.</p> <p>Alat Analisis: analisis regresi linier berganda.</p> <p>Hasil Penelitian: Berlandaskan pada capaian riset yang sudah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu whistleblowing system, Tata Pemerintahan Yang Baik dan efektivitas Pengendalian Internal berdampak positive terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda. • Variabel: Variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakanT ata Pemerintahan Yang Baik Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek dan Lokasi Penelitian • Pada penelitian terdahulu dalam mencegah terjadinya kecurangan menggunakan variabel Whistleblowing System, Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Efektivitas Pengendalian Internal. Sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel whistblowing system.
---	--	---	--	--	--

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Sujarweni (2015:66) kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti maka variabel dependen adalah Pencegahan Kecurangan (Y). Variabel independen adalah Pengendalian Internal (X_1) dan Tata Pemerintahan Yang Baik (X_2), kerangka piker dapat di ilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Secara Parsial

- - - - -> : Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atas masalah penelitian yang secara rasional didedukasi dari teori (Anshori, 2019). Hipotesis menurut Sugiyono adalah jawaban yang belum pasti terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan ialah:

- a) Diduga ada pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Diduga ada pengaruh Tata Pemerintahan Yang Baik terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c) Diduga ada pengaruh Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.